Journal of Telenursing (JOTING) Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember 2024

e-ISSN: 2684-8988 p-ISSN: 2684-8996

OI: https://doi.org/10.31539/joting.v6i2.11773



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKREDITASI DI KLINIK PRATAMA

Rhesiwenny Rushe¹, Ermi Girsang², Sri Lestari Ramadhani Nasution³ Universitas Prima Indonesia^{1,2,3} srilestariramadhaninasution@unprimdn.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan akreditasi di Klinik Pratama Polda Jambi Tahun 2023. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 6 informan. Hasil penelitian diperoleh bahwa komunikasi berupa sosialisasi akreditasi Klinik Pratama Polda Jambi dilaksanakan berkesinambungan, disampaikan dengan jelas dan konsisten sehingga seluruh anggota klinik dapat memahami tujuan akreditasi serta mempersiapkan akreditasi klinik dengan maksimal. Sumber cukup lengkap, seluruh anggota memiliki satu persepsi akan pentingnya akreditasi. *Standart Operating Procedure* (SOP) lengkap sesuai standar akreditasi. Penyebaran tanggung jawab di tubuh internal Polri maupun kerjasama dengan pihak eksternal terkait terjalin. Simpulan penelitian ini adalah adalah implementasi kebijakan akreditasi di Klinik Pratama Polda Jambi berjalan dengan baik ditinjau dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kata kunci : Akreditasi Klinik, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of accreditation policies at the Jambi Regional Police Pratama Clinic in 2023. The research method is descriptive qualitative. Data was collected through in-depth interviews with 6 informants. The research results showed that communication in the form of socialization of Jambi Regional Police Pratama Clinic accreditation was carried out continuously, delivered clearly and consistently so that all clinic members could understand the purpose of accreditation and prepare for clinical accreditation optimally. The source is quite complete, all members have one perception of the importance of accreditation. Complete Standard Operating Procedure (SOP) according to accreditation standards. The distribution of responsibilities within the National Police internal body as well as cooperation with related external parties is established. The conclusion of this research is that the implementation of the accreditation policy at the Jambi Regional Police Pratama Clinic is going well in terms of communication, resources, disposition and bureaucratic structure factors.

Keywords: Clinical Accreditation, Policy Implementation

PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan pengakuan terhadap mutu fasilitas pelayanan kesehatan setelah dilakukan penilaian bahwa fasilitas pelayanan kesehatan telah memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah mengharapkan pada tahun 2024

seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia telah terakreditasi sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020- 2024 dalam rangka penguatan sistem kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Standar akreditasi klinik terdiri atas 3 Bab yaitu Tata Kelola Klinik (TKK), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), dan Penyelenggaraan Kesehatan Perseorangan (PKP), 22 Standar, dan 104 Elemen Penilaian. Setiap bab akan diuraikan dalam standar, tiap standar akan diuraikan dalam elemen penilaian untuk menilai pencapaian kriteria tersebut. Penjelasan dari setiap elemen penilaian tercantum dalam Standar Akreditasi Klinik. Sedangkan penetapan status akreditasi Klinik terdiri atas 4 (empat) tingkatan yaitu: Paripurna, Utama, Madya dan Tidak terakreditasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Pelaksanaan akreditasi klinik di wilayah kerja Polda Jambi diselenggarakan oleh Bidang Kedokteran Kesehatan (Biddokkes) Polda Jambi selaku pembina fungsi pelayanan kesehatan dasar di poliklinik jajaran melalui Urusan Pelayanan Kesehatan / Uryankes (Kepolisian RI, 2018). Terdapat 12 klinik milik Polda Jambi, 3 klinik berlokasi di Kota Jambi, selebihnya masing-masing terdapat 1 klinik di setiap kabupaten. Dari 12 klinik tersebut, 11 klinik sudah menjalankan proses akreditasi, 7 klinik mendapatkan hasil paripurna yaitu ; Klinik Pratama Polda Jambi merupakan klinik yang berada di Kota Jambi dengan jumlah kepesertaan terbesar yaitu 8419 peserta terdaftar.

Kegiatan akreditasi terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu : persiapan akreditasi, pelaksanaan akreditasi, dan pasca akreditasi (Maharani & Diatri, 2024). Persiapan akreditasi klinik-klinik di wilayah kerja Polda Jambi termasuk Klinik Pratama Polda Jambi dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pendampingan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), mulai dari penggalangan komitmen, pengenalan standar dan instrumen akreditasi, pembentukan panitia persiapan akreditasi, pembentukan kelompok kerja sesuai dengan bab dari standar akreditasi, pendampingan, pelaksanaan dan pembahasan hasil *self assessment* bersama tim pendamping akreditasi hingga penilaian pra survei untuk mengetahui kesiapan klinik agar dapat diusulkan untuk dilakukan penilaian akreditasi.

Menurut Astriani et al., (2023) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Proses akreditasi Klinik Pratama Polda Jambi tidak terlepas dari faktor - faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian Sondakh et al., (2020) mengemukakan bahwa persiapan baik dari segi dokumen maupun sumber daya manusia menjadi faktor pendukung terlaksananya akreditasi, sedangkan ketersediaan sarana dan prasarana dan kurangnya pemahaman terkait standar akreditasi menjadi faktor penghambat. Tahap persiapan menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan akreditasi. Pada penelitian Suryanto (2022) disebutkan bahwa faktor yang menjadi penyebab ketidaksiapan klinik "X" menghadapi akreditasi yaitu pengetahuan, komunikasi, persepsi, anggaran, dan sarana prasarana. Ketidaksiapan klinik "X" menghadapi akreditasi dilihat dari hasil simulasi survei penilaian akreditasi pada Klinik "X", belum ada Bab yang mendapat nilai Terpenuhi Lengkap diatas 50 persen. Penelitian Suryani et al., (2019) mengemukakan proses akreditasi Puskesmas Sindang Barang Kota Bogor tahun 2018 berdasarkan aspek – aspek komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi, adapun pada penelitian ini, meskipun memilliki kesamaan dalam metode penelitian, aspek yang diteliti memiliki perbedaan, adapun

novelty penelitian ini adalah ekspolorasi dari implementasi akreditasi yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada informan.

Berdasarkan obervasi dan wawancara awal di Klinik Pratama Polda Jambi, proses akreditasi berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pedoman pendampingan akreditasi FKTP. Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Biddokkes menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya akreditasi hingga mendapatkan hasil paripurna. Hal ini menjadi latar belakang penulis tertarik melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan akreditasi di Klinik Pratama Polda Jambi tahun 2023. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan akreditasi di Klinik Pratama Polda Jambi. Manfaat penelitian ini adalah sebagai referensi bagi sosialisasi manaiemen rumah sakit untuk melakukan akreditasi secara berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Klinik Pratama Polda Jambi. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "social situation" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Analisis data kualitatif adalah proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam, bermakna, unik dan temuan baru yang bersifat deskriptif, kategorisasi dan atau pola-pola hubungan antar kategori dari obyek yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Karakteristik Informan

Kode Informan	Jenis Kelamin	Umur	Pendididikan	Jabatan
Informan 1	Perempuan	43 tahun	S2	Kauryankes Biddokkes Polda Jambi
Informan 2	Perempuan	42 tahun	S2	Kepala Klinik Pratama Polda Jambi / Ketua Pokja BAB I
Informan 3	Perempuan	39 tahun	S 1	Ketua Pokja BAB II
Informan 4	Perempuan	33 tahun	S 1	Ketua Pokja BAB III
Informan 5	Perempuan	29 tahun	S 1	Anggota Klinik
Informan 6	Perempuan	30 tahun	D3	Anggota Klinik

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa seluruh informan berjenis kelamin perempuan dengan usia termuda 29 tahun dan tertua 43 tahun, sedangkan pendidikan terendah D3 dan pendidikan tertinggi S2.

Komunikasi

Persiapan akreditasi Klinik Pratama Polda Jambi sudah dimulai pada tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Biddokkes sebagai pembina fungsi. Berikut peran Biddokkes menurut informan:

"Peran Biddokkes itu sebagai pembina fungsi, antara lain hal – hal apa saja yang harus dipenuhi untuk akreditasi, SDM-nya bagaimana, sumber dana-nya dari mana, mengakomodir siapa yang melaksanakan... yang membimbing... menentukan lembaga akreditasi yang mendampingi sampai survei akreditasi itu semua dari kita" (informan 1).

Persiapan akreditasi klinik pratama adalah penggalangan komitmen seperti yang disampaikan informan berikut ini :

"Tahap pertama pelaksanaan akreditasi itu adalah penggalangan komitmen, tujuannya membangun komitmen seluruh Kapoliklinik bahwa mereka harusterakreditasi. Penggalangan komitmen sendiri diselenggarakan oleh Biddokkes sebagai pembina fungsi" (informan 1).

Dalam kegiatan penggalangan komitmen tersebut Kabiddokkes Polda Jambi sekaligus mensosialisasikan Surat Telegram Kapolri, seperti yang disampaikan informan berikut:

"Untuk piagam penggalangan komitmen kita perbarui, karena Kapolikliniknya kan sudah ganti, anggota kliniknya juga beberapa orang – orang baru... seluruh anggota klinik sangat berkomitmen untuk melaksankan akreditasi" (informan 2).

" tujuannya sama ya, materinya juga sama untuk 12 FKTP dan berkelanjutan sampai sekarang" (informan 1).

"Persiapan akreditasi sebelum Covid itu sudah hampir 100%, namun karena pandemi Covid-19 akhirnya survei akreditasi tertunda" (informan 2).

Tahap berikutnya dari persiapan akreditasi setelah penggalangan komitmen yaitu pengenalan standard dan instrument akreditasi. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh informan berikut :

"Setelah penggalangan komitmen, dilakukan Bimbingan Teknis agar mereka paham tentang akreditasi, setelah itu self assessment... mereka menilai sendiri dari apa yang sudah dipelajari, apa yang harus disiapkan sesuai pokja masing – masing, setelah itu baru dilakukan survei akreditasi" (informan 1).

Menurut beberapa informan, Bimbingan Teknis terlaksana dengan baik dan cukup membantu anggota klinik memahami akreditasi secara umum, seperti terlihat dalam wawancara berikut:

"Bimtek-nya bagus, cukup membantu, cuma mungkin kalau boleh saran untuk ke depannya lebih sering diadakan secara offline ya, kemaren mungkin karena keterbatasn jarak, dan Covid juga, jadi kebanyakan secara online" (informan 2).

"Sosialisasi terlaksana dengan baik tanpa adanya kendala, sosialisasi tsb dilakukan secara berkala.Dalam hal Bimtek itu sangat bermanfaat untuk menghadapi akreditasi karena anggota yang dilibatkan dapat memahami materi - materi yang disampaikan dan bisa mengerti pelaksanaan akreditasi" (informan 4).

"Ya terdapat Bimtek sebelum melaksanakan akreditasi. Berjalan dengan baik dan di ikuti semua peserta Bimtek. Terlaksana dgn baik, tidak ada kendala" (informan 6). Berikut tanggapan beberapa informan terkait hal – hal yang dibahas dalam bimbingan teknis :

"Materi yang diberikan sesuai dengan kriteria akreditasi yang dibutuhkan di klinik" (informan 3).

"Hal - hal yang disampaikan adalah berkaitan dengan akreditasi dari hal seperti pelayanan pasien resiko, rencana asuhan, pendaftaran, kajian awal, asuhan gizi, pelayan labor, pelayanan kefarmasian...serta tekait dalam ruang lingkup klinik menyangkut aspek dalam akreditasi" (informan 4).

"Narasumber menjelaskan tentang elemen penilaian untuk survei akreditasi, membimbing untuk membuat SK, SOP dan bukti - bukti untuk penilaian akreditasi, menjelaskan dan membimbing tentang tata cara penilaian mutu klinik" (informan 5).

Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis memaparkan dengan jelas. Berikut tanggapan informan mengenai narasumber :

"Cukup kompeten... materi lengkap... sangat membantu... dan tidak membosankan. Harus banyak baca – baca lagi biar lebih paham" (informan 1).

"Narasumber yang dihadirkan sangat berkompeten dan berpengalaman...materi yang disampaikan sangat bisa dicerna...apa yang kita butuhkan pun dalam menyelesaikannya juga sangat membantu" (informan 3).

"Informasi yang diberikan sangat jelas dan dapat dipahami anggota klinik sehingga anggota klinik dapat memahami standar serta instrumen akreditasi dengan baiK" (informan 4).

Anggota klinik sangat terbantu dengan adanya pendampingan maksimal dari para pendamping sehingga dapat menanyakan hal-hal sehubungan akreditasi pada saat diperlukan seperti yang disampaikan beberapa informan berikut;

"Pendampingnya cukup baik, responsif dan mau dihubungi kapan saja bisa, sangat membantu kitalah untuk mempersiapkan akreditasi " (informan 2).

"Pendamping saat membimbing akreditasi sangat lah baik dalam memberikan bimbingan. Pendamping juga sangat cepat merespon kendala apa saja yang tidak kita mengerti" (informan 3).

"Sangat baik, sangat respon dan dapat dihubungi kapan saja untuk mendampingi terkait dokumen akreditasi" (informan 5).

Informasi yang disampaikan cukup jelas baik dari dasar hukum kebijakan akreditasi maupun pedoman pelaksanaan berupa standar dan instrument akreditasi.

"Sosialisasi-nya sudah bagus, baik dari Biddokkes maupun Pusdokkes, tapi ya itu tadi, untuk kedepannya diharapkan lebih banyak offline" (informan 1).

" pelaksanaannya sesuai jadwal dan materi yang diberikan sesuai dengan kriteria akreditasi yang dibutuhkan di klinik" (informan 3).

"Sosialisasi terlaksana dgn baik, tidak ada kendala, narasumber menjelaskan pedoman akreditasi dengan baik" (informan 6).

Sumber Daya

Berdasarkan data kepegawaian semester II tahun 2023 terdapat 13 orang personil yang terdiri atas 3 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 orang Tenaga Mitra.

"Untuk SIP asisten apoteker saat itu sedang dalam proses, karena yang sebelumnya mengundurkan diri, tapi tidak menjadi masalah karena kita ada apoteker dan SIP asisten apoteker sebelumnya juga ada" (informan 2).

Pelatihan-pelatihan untuk menunjang pelaksanaan akreditasi juga diselenggarakan oleh Biddokkes Polda Jambi.

"Selain memfasilitasi kegiatan Bimtek dan pendampingan, kita juga mengadakan pelatihan — pelatihan untuk menunjang akreditasi, seperti pelatihan BHD... pelatihan APAR... ya disesuaikan lah dengan kebutuhan dan anggaran" (informan 1).

"Kalau untuk SDM sebenarnya masih kurang kalau harus betul – betul lengkap, karena klinik ini 1 hari saja bisa 60 pasien" (informan 2).

"SDM sudah cukup terpenuhi termasuk SDM nya juga diberikan pelatihan - pelatihan guna menunjang terlaksananya akreditasi klinik" (informan 3).

Berdasarkan rekapitulasi pengisian *self assessment* oleh pendamping, Klinik Pratama Polda Jambi mendapatkan skor 65,66%, untuk mendapatkan akreditasi paripurna dibutuhkan skor akhir minimal 80.

Faktor yang mendukung adalah team work... dengan kerjasama tim yang bagus, kooperatif, saling toleransi, itu yang bikin penilaian self assessment kita bagus, bahkan skornya terus meningkat ke 90%" (informan 2).

"seluruh prosesnya dibantu oleh tim dari lembaga penyelenggara akreditasi" (informan 1)

"LPA sangat membantu sekali ya, bagian administrasinya terutama, ada kesulitan kita di sistem juga mereka mau bantu sampai ke pusat" (informan 2).

Dalam penyelenggaraan akreditasi terdapat surat sebagai dasar pelaksanaan tugas baik sebagai penyelenggara maupun pelaksana kebijakan akreditasi Klinik Pratama Polda Jambi seperti Surat Telegram (ST), surat perintah (sprin), surat tugas dan sejenisnya.

"Setiap kebijakan, kegiatan, apapun,termasuk akreditasi, itu ada surat perintah resminya... ya sebagai dasar untuk pelaksanaan tugas dan pelaporan nantinya" (informan 1).

"Sprin ada, tiap bimtek itu ada surat pemanggilan, biasanya disampaikan lewat WA grup... di klinik juga ada SK SK (informan 2).

Klinik Pratama Polda Jambi melengkapi kebutuhan sarana prasarana klinik dengan mengajukan Rencana Kebutuhan (Renbut) kepada Biddokkes Polda Jambi melalui Uryankes.

"Sistemnya setiap klinik mendata apapun yang dibutuhkan kemudian bersurat resmi mengajukan renbut kepada Biddokkes... karena akreditasi ini kan selain SDM juga butuh sarana prasarana, nanti akan dipenuhi sesuai ketersediaan anggaran sehingga persyaratan akreditasi bisa terpenuhi." (informan 1).

"Kalau untuk anggaran, ya gak terlalu rumit, karena kita kan anggaran dari Biddokkes sebagai atasan langsung, gak terlalu repot prosedurnya, kalau kita mengajukan renbut juga langsung direspon" (informan 2).

Disposisi

Seluruh anggota Klinik melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sama dalam mempersiapkan dokumen akreditasi, seperti yang disampaikan informan berikut:

"Seluruh anggota klinik sangat berkomitmen untuk terlaksananya akreditasi, sangat kompak, semua dilaksanakan sesuai ketentuan" (informan 2).

"Akreditasi tujuannya baik, kita semua berusaha agar hasilnya bagus" (informan 3).

"Semua bekerja sama, saling bantu, saling support, komit lah agar hasilnya paripurna" (informan 4).

Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, kerjasama lintas sektor dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan penyelenggaraan akreditasi.

"Puji Tuhan berjalan lancar sehingga survei akreditasi terselenggara dengan baik dan untuk Klinik Pratama Polda Jambimendapatkan hasil paripurna" (informan 1).

"Koordinasi Klinik Polda dengan Biddokkes cukup baik, pelaporan – pelaporan lengkap, dilaporkan kepada Kabiddokkes melalui Uryankes. Semua kegiatan terkait akreditasi, jadwal - jadwal, kebutuhan – kebutuhan klinik, semua dikoordinasikan dengan baik" (informan 1).

"Koordinasi antar anggota klinik sangat baik, saling bekerjasama... semua dibicarakan dan dilaporkan sesuai prosedur. Koordinasi dengan Biddokkes juga sangat baik" (informan 2).

PEMBAHASAN

Komunikasi di Klinik Pratama Polda Jambi terlaksana dengan baik sehingga prosess persiapan akreditasi berjalan lancar. Hal ini sejalan dengan penelitian Hermawati et al., (2022) menyampaikan bahwa komunikasi organisasi pada dasarnya adalah interaksi yang dilakukan dalam lingkup organisasi. Interaksi mencakup antar internal organisasi mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan dalam organisasi.

Komunikasi interpersonal para petugas kesehatan dapat dilakukan dengan memberikan komunikasi kepada pasien dengan memanfaatkan kader yang memiliki ikatan psikologis lebih dekat dengan masyarakat untuk melakukan kunjungan langsung dengan mensosialisasikan pentingnya kesehatan (Yunie et al., 2022). Komunikasi

merupakan salah satu dari empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dalam (Astriani et al., 2023).

Komunikasi merupakan hal penting yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan kolaborasi, karena melalui komunikasi proses penyampaian informasi antar satu dengan yang lain akan lebih jelas dan dapat meningkatkan kerjasama serta kolaborasi yang baik (Sari & Noviyanti, 2023). Tenaga kesehatan harus bekerja sama dengan baik dan tidak melakukan pelayanan kesehatan sendiri, yang akan mendatangkan keuntungan tersendiri. Salah satu faktor yang menghambat terselenggaranya kerjasama antar tenaga kesehatan adalah komunikasi yang kurang baik (Ita et al., 2021).

Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa sumber daya manusia Klinik Pratama Polda Jambi sudah mencukupi baik dari segi jumlah, kelengkapan administrasi maupun pelatihan – pelatihan yang diikuti oleh tenaga kesehatan klinik.

Sejalan dengan penelitian Suryanto (2022) menyebutkan bahwa faktor pertama yang menjadi penyebab ketidaksiapan menghadapi akreditasi adalah pengetahuan karyawan klinik tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan klinik. Manajemen sumber daya manusia kesehatan merupakan salah satu bagian terpenting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan juga meningkatkan kualitas di fasilitas kesehatan. Sumber daya kesehatan menjadi komponen kunci dalam perubahan pembangunan kesehatan di Indonesia (Aprianto & Zuchri, 2021).

Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Atau sumber daya manusia yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berprilaku dipengaruhi oleh keturunan maupunlingkungannya serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif (Paramarta et al., 2023).

Disposisi

Seluruh anggota Klinik melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sama dalam mempersiapkan dokumen akreditasi. Disposisi adalah sikap dan komitmen pelaksana mengenai suatu implementasi kebijakan atau program. Pelaksana yang memiliki tekad dan komitmen yang kuat dibutuhkan dalam setiap kebijakan agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan (Rodiyah et al., 2022).

Penelitian Lestari, (2021) menyatakan bahwa komitmen menjadi faktor penting dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi/manajemen menjadi empat kategori yaitukarakter personal, karakteristik pekerjaan, karakteristik structural, pengalaman kerja. Rivaldi et al., (2024) menyatakan bahwa ada hubungan komitmen afektif dengan kinerja di Puskesmas Majauleng, bahwa komitmen afektif yang tinggi akan memberikan kinerja yang tinggi sebanyak 45 responden (66.18%). Komitmen organisasi berpengaruh terhadap perilaku kerja inovatif. Komitmen organisasi sebagai sikap yang menunjukan apakah seorang pegawai tetap bertahan menjadi anggota organisasi atau meninggalkan organisasi untuk mengejar pekerjaan lain (Gusmayanti et al., 2023).

Komitmen mampu memediasi pengaruhMotivasinya kepada Kinerja Pegawainya pada Puskesmas yang ada di Sidemen (Dewi et al., 2021). Komitmen karyawan juga dapat membantu mengurangi tingkat pergantian karyawan. Dalam rangka membangun

komitmen karyawanyang kuat, rumah sakit perlu menciptakan budaya organisasi yang mendukung, dengan nilai-nilai yang jelas dan komunikasi yang efektif (Karida & Dhamanti, 2024).

SIMPULAN

Komunikasi berupa sosialisasi akreditasi Klinik Pratama Polda Jambi dilaksanakan berkesinambungan, disampaikan dengan jelas dan konsisten sehingga seluruh anggota klinik dapat memahami tujuan akreditasi serta mempersiapkan akreditasi klinik dengan maksimal. Sumber cukup lengkap, seluruh anggota memiliki satu persepsi akan pentingnya akreditasi. Standart Operating Procedure (SOP) lengkap sesuai standar akreditasi. Penyebaran tanggung jawab di tubuh internal Polri maupun kerjasama dengan pihak eksternal terkait terjalin.

SARAN

Agar sosialisasi terkait akreditasi Klinik Pratama Polda Jambi tetap dilaksanakan secara berkesinambungan guna mempersiapkan akreditasi klinik selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, B., & Zuchri, F. N. (2021). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Kesehatan: a Literature Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2(3), 160–166. https://doi.org/10.31004/jkt.v2i3.2161
- Astriani, E., Wirata, G., & Sumada, I. M. (2023). Implementasi Kebijakan Akreditasi Rumah Sakit di RSK Ibu Anak Pucuk Permata Hati Denpasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 21989–21996.
- Dewi, N. K. A. L., Saraswati, N. P. A. S., & Widyani, A. A. D. (2021). Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Pegawai dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemediasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Sidemen. *Values Journal*, 2(2), 324–332. https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/value/article/view/2678
- Gusmayanti, I. S., Isyandi, B., & Efni, Y. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Iklim Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Perilaku Kerja Inovatif pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. *Journal of Social Science Research*, 3(2), 9225–9240. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1419
- Hermawati, A., Purbaningsih, Y., Iwe, L., Ruspendi Junaedi, I. W., & Wibowo, T. S. (2022). Motivasi Kerja terhadap Kinerja Tenaga Kesehatan Berbasis Implementasi Kompetensi dan Komunikasi Organisasi. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(2), 2199–2209. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.815
- Ita, K., Pramana, Y., & Righo, A. (2021). Implementasi Interprofessional Collaboration antar Tenaga Kesehatan yang ada di Rumah Sakit Indonesia: Literature review. *Jurnal ProNers*, 6(1), 1–6. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jpn.v6i1.48002
- Karida, R., & Dhamanti, I. (2024). Peran Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Kualitas Kerja dan Komitmen Karyawan Rumah Sakit. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(2), 2674–2684. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jkt.v5i2.21007
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor Hk.02.02/I/3991/2022 Tentang Petunjuk Teknis

- Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandir. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. https://yankes.kemkes.go.id/unduhan/fileunduhan_1672286537_68043.pdf
- Kepolisian RI. (2019). Perpol Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
- Lestari S. (2021). Pengaruh Komitmen Manajemen, Perilaku Positif Tenaga Kesehatan dan Dukungan Dinkes terhadap Kualitas Layanan pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. *Kindai*, *17*(2), 227–241. https://doi.org/10.35972/kindai.v17i2.651
- Maharani, C., & Diatri, D. (2024). Persiapan dan Pelaksanaan Akreditasi di Klinik Pratama Sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama: Sebuah Studi Kasus. *Journal Health & Science: Gorontalo Journal Health and Science Community*, 8(3), 140-158. https://doi.org/10.35971/gojhes.v8i3.26302
- Paramarta V., Palenewen A. A. P., Linelejan H. N., Firdaus F., & Kolibu, D. (2023). Peran Sumber Daya Manusia dalam Proses Transformasi Organisasi di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia*, *3*(2), 88–95. https://doi.org/10.55606/jikki.v3i2.1646
- Rivaldi, M. P., Ikhtiar, M., Haeruddin, Asrina, A., & Amir, H. (2024). Hubungan Komitmen Petugas Kesehatan dengan Kinerja dalam Pelayanan. *Jurnal Keperawatan*, *16*(1), 79–86. https://doi.org/https://doi.org/10.32583/keperawatan.v16i1.1426
- Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. UMSIDA Press Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Sari, N. L., & Noviyanti, A. (2023). Literature Review: Komunikasi Efektif dalam Pelaksanaan Interprofessional Kolaborasi Di Rumah Sakit. *Indonesian Journal of Health Information Management*, *3*(1). https://ijhim.stikesmhk.ac.id/ojsdata/article/view/96.
- Sondakh, I. C., Korompis, G. E. C., & Mandagi, C. K. F. (2020). Implementasi Kebijakan Akreditasi Puskesmas di Kota Manado. *Jurnal KESMAS*, *9*(4), 65–69. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/29588
- Suryani, A., Chotimah, I., & Hidana, R. (2019). Analisis Proses Akreditasi Puskesmas Sindang Barang Kota Bogor Tahun 2018. *Jurnal Kesmas*, 2(2), 87–100. https://doi.org/10.32832/pro.v2i2.1794
- Suryanto, H. (2022). Faktor Penyebab Ketidaksiapan Klinik "X" Menghadapi Akreditasi. *Jurnal Riset Pengembangan Dan Pelayanan Kesehatan*, 1(2). https://jurnal.iik.ac.id/index.php/jenggala/article/view/65
- Yunie, C., ST, S., & Ringganis, G. (2022). Komunikasi Konseling dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia (Literature Review). *Komunikasi Konseling dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia (Literature Review)*, 2(13), 22–28. https://doi.org/https://doi.org/10.48186/bidkes.v13i2.433